

ANTARA DEMOKRASI DAN DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Arif Budi Rahman

Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan
arifmof@yahoo.com

ABSTRAK

Diskursus tentang keterkaitan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara telah menjadi topik menarik berbagai kalangan mulai dari akademisi, negara-negara donor, lembaga keuangan multilateral, hingga birokrat. Dalam karya tulis ini penulis akan membahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia serta keterkaitannya dengan lambannya laju pertumbuhan ekonomi nasional paska lengsernya Suharto. Meskipun di satu pihak Indonesia telah diakui sebagai negara demokrasi oleh berbagai institusi internasional terkemuka, namun di pihak lain laju pertumbuhan ekonomi nasional tidak sepadan dengan prestasi dimaksud. Berdasarkan pembahasan tersebut penulis berargumen bahwa ada beberapa variabel selain demokrasi sebagai prasyarat percepatan tingkat pertumbuhan ekonomi seperti tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi: akuntabilitas pemerintahan, stabilitas politik dan minimalisasi kekerasan, pemerintah yang efektif, peraturan yang berkualitas, dan pencegahan korupsi. Disamping itu, adanya kepemimpinan yang efektif yang mampu menciptakan program inovatif tanpa dibebani target politis jangka pendek juga akan menjadi katalisator utama pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan.

Kata kunci: demokrasi, determinan pertumbuhan ekonomi

PENDAHULUAN

Sejak kejatuhan rezim Suharto tahun 1998, Indonesia telah mencapai kemajuan cukup berarti dalam berdemokrasi. Berbagai prestasi tersebut nampak nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung,

kebebasan berpendapat dan berserikat, serta desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah. Namun di lain pihak, performa ekonomi era reformasi justru belum mampu menyamai prestasi orde lama. Meskipun pertumbuhan ekonomi rata-rata diatas 5 persen pertahun dan nilai tukar rupiah juga terus menguat, namun kondisi ini masih dianggap kurang memadai untuk bisa menyerap angkatan kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Paper ini akan berupaya untuk menganalisa keterkaitan antara sistem demokrasi di Indonesia dan performa ekonomi dalam masa lebih dari satu dekade paska lengsernya Suharto. Setidaknya ada dua pertanyaan utama yang akan coba dianalisa. Pertama, adakah korelasi antara sistem demokrasi dengan performa ekonomi suatu negara? Kedua, mengapa performa ekonomi Indonesia pasca Soeharto kurang begitu menggembirakan? Guna menjawab kedua pertanyaan di atas, penulis akan menggunakan sumber data sekunder (dokumen dan literatur) baik dari institusi lokal, nasional maupun internasional.

Penulis berpendapat bahwa dalam jangka panjang ada korelasi positif antara demokrasi dan performa ekonomi. Untuk kasus Indonesia, lambannya pertumbuhan ekonomi dewasa ini dikarenakan absennya praktik good governance dalam mengelola negara, dimana demokrasi hanya merupakan salah satu bagian didalamnya. Adapun sistematika penulisan dalam paper ini adalah pertama pendahuluan, kedua studi literatur, ketiga pembahasan tentang korelasi antara transisi demokrasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan terakhir kesimpulan.

LANDASAN TEORI

Diskursus korelasi antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi telah berlangsung cukup lama. Beberapa studi meyakini bahwa kebebasan politik akan mendorong munculnya kebebasan aktivitas ekonomi yang pada gilirannya akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi (Freedman, 1962). Namun beberapa studi lain menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan diantara dua variabel tersebut. Studi ekonometrik menggunakan data antar negara selama kurun waktu tahun 1960 – 1990 yang dilakukan oleh Barro (1996) menemukan bahwa keterkaitan antara demokrasi dan kesejahteraan ekonomi suatu negara, lebih merupakan hubungan antara demokrasi dan variabel-variabel pertumbuhan ekonomi yang lain seperti:

kemampuan menegakkan aturan hukum, menjamin pasar bebas, dan peningkatan kualitas SDM.

Sedangkan menurut Abdellatif (2003) tata pemerintahan yang demokratis akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan cara menghambat pejabat-pejabat yang korup untuk memimpin, memfasilitasi kebebasan pers untuk memonitor praktik korupsi, serta menyebarkan informasi tentang perilaku korup pejabat pemerintah kepada masyarakat luas. Dengan demikian, pemerintah yang demokratis akan menjamin akuntabilitas pejabat publik.

Setidaknya ada tiga mazhab utama untuk membedah keterkaitan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi ini. Pertama, beberapa analis percaya bahwa ada hubungan kausalitas antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Semakin demokratis suatu negara maka hak-hak ekonomi warga negara akan terjaga sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Jaminan kebebasan berusaha tiap individu ini akan menjaga keberlangsungan perputaran roda ekonomi yang merupakan kondisi ideal bagi masyarakat bebas (Friedman, 1962).

Kedua, beberapa pakar lain meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi akan mendorong demokratisasi namun demokrasi itu sendiri justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi demokrasi erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, namun sebaliknya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak ada hubungannya dengan demokrasi. Beberapa negara kaya yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi justru tingkat pertumbuhan itu menurun paska penerapan sistem demokrasi. Sementara itu di negara-negara miskin non demokrasi justru akan menikmati pertumbuhan GDP tanpa terhalang sistem demokrasi itu sendiri. Singkatnya, "sistem diktator diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi" (Przeworski dan Limongi, 1997:177).

Ketiga, pendapat lain mengatakan bahwa kaitan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi bersifat non linear. Maksudnya, di negara miskin dengan pertumbuhan ekonomi rendah, demokrasi akan menjadi penghambat pembangunan. Sedangkan di negara dengan ekonomi yang lebih maju, demokrasi akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan negara non demokrasi dengan tingkat perekonomian setara (Barro 1996).

Singkatnya, pemerintahan yang demokratis dalam artian tersedianya pemilu yang bebas dan adil akan memberikan kesempatan bagi warga negaranya untuk mengganti para pemimpin politik yang korup

dan tidak bertanggung jawab secara damai dan reguler. Hal ini dalam jangka panjang tentu akan mendorong para pemimpin politik tersebut berusaha memerintah secara lebih efektif guna menarik dukungan mayoritas rakyat (Abdellatif, 2003). Disamping itu, sistem demokrasi juga menyediakan sarana atau instrumen non-pemilu seperti kebebasan berserikat dan kebebasan pers untuk memonitor jalannya roda pemerintahan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Pemerintahan yang tidak demokratis pada umumnya terlalu tamak dalam mengeksploitasi sumber daya alam, korup, dan adanya distorsi ekonomi yang bermuara pada tingginya tingkat kemiskinan. Dalam kondisi demikian, minimnya investasi akan berdampak pada lambannya pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan mengancam kemampuan pemerintah dalam membiayai pendidikan, jaminan sosial, dan manajemen lingkungan yang bertanggung jawab dimana semua itu merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan (Morita dan Zaelke, 2007).

TRANSISI DEMOKRASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Menilik proses demokratisasi di Indonesia sepanjang lebih dari satu dasa warsa terakhir, nampak bahwa Indonesia telah melewati transisi politik dari rejim otoriter ke sistem demokrasi dengan tanpa kendala berarti. Banyak analis yang menyatakan salut dengan capaian tersebut mengingat Indonesia 13 tahun silam masih merupakan negara sentralistik yang tidak ada pemisahan kekuasaan secara jelas dan aturan perundangan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Apabila menggunakan parameter Dahl (1956) tentang demokrasi poliarkal yang terdiri atas pemilu luber dan terjadwal untuk menduduki jabatan publik, adanya peran serta masyarakat, kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi, serta kebebasan berserikat, maka Indonesia bisa ditasbihkan sebagai negara *full fledge* demokrasi.

Bahkan *Freedom House*, sebuah lembaga pembela hak asasi dan kebebasan sipil yang berbasis di Washington, yang setiap tahun secara teratur mengeluarkan indeks kebebasan demokrasi global telah menganugerahi Indonesia sebagai negara bebas (Freedom House, 2006). Faktor penunjang prestasi dimaksud adalah karena ada kemajuan dalam pemberian hak politik warga negara dan

kebebasan sipil, kesuksesan pelaksanaan Pemilu tahun 2004 yang merupakan pemilu pertama dimana presiden bisa dipilih secara langsung oleh rakyat, dan penandatanganan perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka setelah puluhan tahun berseteru.

Ada beberapa catatan penting terkait perubahan lansekap politik Indonesia paska lengsernya Suharto. Pertama, ada transisi demokrasi secara damai dari Suharto ke wapres Habibie pada bulan Mei 1998. Kedua, paska peralihan kekuasaan tersebut, revisi dan amandemen konstitusi segera dilakukan. Amandemen ini memodifikasi struktur lembaga perwakilan (DPR) dari sistem yang problematik yang merefleksikan kurangnya konsensus menjadi lebih berorientasi ke aturan permainan yang telah disepakati (USAID, 2008). Apabila sistem sebelumnya MPR memiliki wewenang memilih presiden dan wakilnya, maka sekarang mereka dipilih langsung oleh rakyat (Hill dan Shiraishi, 2007).

Ketiga, amandemen UU ini menjadi dasar hukum bagi serangkaian pemilu legislatif tahun 1999 dan pemilihan presiden secara langsung pertama tahun 2004. Transisi kepemimpinan nasional dari presiden Megawati Ke SBY secara damai, terbuka, dan relatif adil dipandang krusial sebagai pijakan reformasi tata kelola pemerintahan mendatang (Legawa, 20006).

Empat, kini rakyat Indonesia bisa menikmati kebebasan politik secara ekstensif. Partai politik bermunculan dan berkompetisi secara bebas guna mendapatkan dukungan rakyat. Parlemen juga telah menjelma menjadi aktor politik kunci di negeri ini lantaran peningkatan wewenangnya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan. Walaupun tingkat akuntabilitas anggota DPR itu sendiri masih menjadi problem, namun kemajuan tersebut sudah sangat bagus dibanding era depolitisasi ekstrem era Suharto (Hart, 2001).

Lima, adanya kebebasan pers. Paska lengsernya Suharto, pemerintah menghapus semua restriksi terkait kebebasan media. Disahkan UU kebebasan media pada bulan Oktober 1999 telah meningkatkan kebebasan berpendapat di Indonesia (UNESCO, 2000). UU ini telah mengeliminasi segala aturan tentang perlunya lisensi penerbitan dan wewenang pemerintah untuk memberangus pers. Kini pers telah menjadi wahana efektif untuk komunikasi publik termasuk berbagai isu miring berbagai kebijakan pemerintah.

Prestasi lain adalah semakin tumbuh-kembangnya berbagai organisasi kemasyarakatan sipil. Meningkatnya jumlah LSM untuk berpartisipasi dalam aneka diskursus publik seperti isu korupsi, advokasi, diseminasi informasi, promosi tata kelola pemerintahan yang baik, dan reformasi hukum menunjukkan bahwa mereka berperan penting dalam arus informasi dan proses monitoring aktivitas pemerintah maupun dalam mempengaruhi agenda pembangunan nasional.

Enam, desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Disahkannya UU Pemda dan keuangan daerah telah memberikan kewenangan besar bagi pemda untuk mengelola pemerintahan dan keuangannya sendiri. Sebagai konsekuensinya, pemilih lokal telah menjadi pemain utama guna mengontrol akuntabilitas pejabat publik lokal karena sekarang mereka dipilih secara langsung.

Segala capaian diatas sekaligus meruntuhkan adagium Islam dan demokrasi tak pernah sejalan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, Indonesia telah mendemonstrasikan pada dunia bahwa tidak ada yang aneh dengan menjalankan ajaran Islam sekaligus berdemokrasi.

Kendati prestasi demokrasi tersebut telah menempatkan Indonesia sebagai “negara normal” (McIntyre dan Ramage, 2008), ada beberapa pertanyaan yang masih menggajal. Kemajuan ekonomi era reformasi dirasa lebih lambat bahkan termasuk yang paling tertinggal di antara negara tetangga (Aziz, 2008). Hal ini nampak dari tingkat pertumbuhan ekonomi (GDP) yang merefleksikan peningkatan standar kualitas hidup dan penurunan level kemiskinan. Walaupun studi ADB (2008) menggarisbawahi kemampuan ekonomi Indonesia untuk menangkis krisis ekonomi eksternal, pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya sekitar 5,1 persen pertahun, masih dibawah era Soeharto.



Sumber: BPS

Gambar 1; Pertumbuhah GDP (% pertahun)
Dikutip dari Bank Indonesia, 2009

Tidak bisa dipungkiri bahwa prestasi ekonomi selama tiga dasa warsa kekuasaan Suharto memang sangat impresif (Sukma, 2003). Pertumbuhan ekonomi rata rata tercatat sekitar 7 persen pertahun. Income perkapita juga meningkat pesat dari US\$70 pada tahun 1970 menjadi US\$1000 di tahun 1996. Dan antara tahun 1970 hingga 1990, angka kemiskinan berkurang drastis dari 60 persen menjadi 15 persen (Schwarz, 1994). Bahkan Indonesia pernah ditasbihkan sebagai kekuatan ekonomi baru Asia oleh World Bank (WB, 1993).

Sayangnya, krisis ekonomi pada tahun 1997 yang berujung pada lengsernya Suharto, telah berdampak pada sebagian besar rakyat Indonesia. Sekitar 38 juta orang jatuh di bawah garis kemiskinan, nilai mata uang rupiah merosot hingga 60 persen, dan angka pengangguran tercatat lebih dari 20 persen (IFRC, 2000). Ditengah kesulitan ekonomi yang mendera dan ketidakpuasan yang merajalela, sebenarnya Indonesia hanya mengalami kontraksi ekonomi pada tahun 1998. Pada masa sesudahnya indikator kunci makro ekonomi menunjukkan penguatan dengan pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen.

Indicator	1998	2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2009
Voice and Accountability	16,3	37	38,5	38	38,5	44,2	42,8	43,3	48,3
Political Stability	9,1	6,3	9,1	3,4	6,3	14,4	13,9	18,3	24,1
Government Effectiveness	20,4	36,4	34,5	34,5	44,7	39,7	45,1	46,4	46,7
Regulatory Quality	38,5	36,1	25,9	27,8	26,8	36,6	43,9	44,2	42,9
Rule of Law	22,4	24,8	17,6	19	27,6	24,3	28,1	30	34,4
Control of Corruption	13,1	16	10,2	15,5	19,9	20,9	25,2	33,3	28,1

Gambar 2: WORLDWIDE GOVERNANCE INDICATORS FOR INDONESIA

(Percentile Rank)Source: World Bank
(info.worldbank.org/governance/wgi/sc.chart.asp)

Kendati demikian, angka pertumbuhan ekonomi tersebut kurang memadai untuk bisa menciptakan kesempatan kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan (McIntyre dan Resosudarmo, 2003). Menurut hemat kami, ketidakmampuan pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi sebagaimana pernah dicapai pada era sebelumnya adalah karena ketidakberdayaan pemerintah untuk menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* mencakup enam parameter dimana demokrasi merupakan bagian didalamnya. Elemen *good governance* tersebut meliputi: *voice and accountability*, *political stability*, *government effectiveness*, *regulatory quality*, *rule of law*, dan *control of corruption* (Kaufmann, et al, 2008).

Dari gambar di atas nampak bahwa Indonesia masih lemah dalam penegakan hukum, kualitas regulasi, dan pemberantasan korupsi. Jika tidak ada kemajuan dalam pelaksanaan *good governance* ini dikawatirkan dalam jangka panjang akan terjadi pembalikan arah demokrasi. Berdasarkan kajian Asian Development Bank (ADB, 2000) praktik tata kelola pemerintahan yang baik sangat krusial karena

menyangkut tiga alasan: (i) good governance akan meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang, (ii) tata kelola yang baik juga meminimalisir tingkat risiko kerawanan ekonomi jika terjadi krisis. Ketiadaan informasi dan prosedur yang memadai bagi investor akan memicu kepanikan dan ketidakmampuan mengambil keputusan secara rasional. (iii) *good governance* dan transparansi akan meningkatkan partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Przeworsky et al (1996), masalah keruwetan ekonomi dapat merongrong dan menjatuhkan rezim berkuasa baik di negara demokrasi maupun non demokrasi. Agar sistem demokrasi tersebut bisa langgeng diperlukan tidak semata institusi tapi juga norma, nilai, dan kultur demokrasi (Sukma, 2006). Kegagalan pemerintah menjalankan roda perekonomian dan mengatasi masalah sosial akan memberi legitimasi bagi aktor politik, bahkan militer, merongrong dan menjatuhkan pemerintah (McLeod dan McIntyre, 2007).

Minimnya budaya demokrasi di Indonesia juga menjadi kekhawatiran para analis akan terjadinya setback di masa mendatang. Sebagai negara demokrasi baru, Indonesia masih rawan terjadi pembalikan. Negara demokratis yang miskin, khususnya dengan income perkapita kurang dari \$1000 adalah sangat rawan. Przeworsky et al (1996) menegaskan bahwa “kemiskinan merupakan musuh utama demokrasi”. Kegagalan pemerintah menstabilisasi harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak, kedelai, BBM, dan listrik bisa mengguncang stabilitas pemerintahan dan mengancam kelangsungan hidup sistem demokrasi di Indonesia (USAID, 2008). Survei terbaru Indo Barometer (2011) yang menyatakan Orde Lama lebih baik dari kondisi saat ini setidaknya menguatkan argumen diatas.

Hal lain yang juga urgen adalah keberanian pemerintah khususnya presiden untuk menciptakan program inovatif tanpa dibebani target politis jangka pendek. Perubahan politik dramatis tanpa disertai perubahan kultur terutama di jajaran birokrasi telah mengakibatkan inefisiensi karena para birokrat tersebut masih bekerja dengan paradigma lama dan *doing business as usual* (Synnerstrom, 2007).

SIMPULAN

Paper ini telah memaparkan transisi demokrasi di Indonesia paska kejatuhan Suharto tahun 1998. Ada berbagai kemajuan cukup berarti dalam upaya menuju sistem pemerintahan yang lebih melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai bentuk pengakuan tersebut, Indonesia dinobatkan sebagai salah satu negara dengan kebebasan sipil dan hak politik terbaik di kawasan Asia (Rieffel, 2007).

Namun demikian, kondisi ekonomi belum secerah prestasi demokrasi tersebut. Walaupun Indonesia selalu mencatat pertumbuhan GDP diatas 5 persen, angka itu masih belum memadai untuk mengimbangi derasnya angkatan kerja baru dan tingkat kemiskinan yang masih begitu tinggi. Argumen inti dalam paper ini adalah sistem demokrasi di Indonesia bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang bila dilengkapi dengan adanya kepastian hukum, akuntabilitas pemerintahan, stabilitas politik dan sosial, pemerintah yang efektif, peraturan yang berkualitas, dan pencegahan korupsi. Berbagai tantangan tersebut harus segera diatasi karena kekecewaan rakyat terhadap performa ekonomi yang tidak memuaskan bisa mendorong terjadinya *setback*.

DAFTAR PUSTAKA

Abdellatif, A. M. (2003). *Good Governance and Its Relationship to Democracy and Economic Development, Paper presented at the Global Forum III on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity*, Seoul 20-31 May 2003.

ADB (Asian Development Bank) (2000). *Democracy, Good Governance and Transparency in the Asian Context, paper presented at the National Symposium on Democracy, Good Governance and Transparency in the Asian Context. Cambodia 14-15 March 2000. Available at: www.adb.org/Documents/Speeches/1999/Transparency/cam_speech.pdf*

ADB (Asian Development Bank) (2008). *ADB and Indonesia 2008 Fact Sheet, March 2008. Available at http://www.adb.org/Documents/Fact_Sheets/INO.pdf*

Azis, I.J. (2008). *Indonesia's Slow Recovery After Meltdown. Asian Economic Papers*, 7(1), pp 79-103

- Bank Indonesia (2009), *Outlook Ekonomi Indonesia: Krisis Finansial Global dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia*, Biro Riset Ekonomi Bank Indonesia, Januari 2009, hal 23
- Barro, R. J. (1996). *Democracy and Growth*, Journal of Economic Growth, 1(Mar), pp. 1-27
- Dahl, R. A. (1956). *A preface to democratic theory*, Chicago, University of Chicago Press.
- Friedman, M. (1962), *Capitalism and Freedom*, Chicago: University of Chicago Press.
- Freedom House (2006) *Freedom in the World 2006*, Available at: www.freedomhouse.org
- IFRC (International Federation of Red Cross and Red crescent Societies) (2000). *Indonesia: Socio-Economic Crisis, Situation report no. 2 (final) period covered: 17 March 1999 - 30 September 2000*. Available at <http://www.ifrc.org/docs/appeals/99/099902.pdf>.
- Hart, N.H. (2001). *Anti -Corruption Strategies in Indonesia*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 37(1), pp. 65–82
- Hill, H and Shiraishi, T (2007), *Indonesia After the Asian Crisis*. Asian Economic Policy Review, Vol. 2, No. 1, pp. 123-141, June 2007
- Indobarometer (2011), *Evaluasi 13 tahun reformasi dan 18 bulan pemerintahan SBY-Boediono*, Available at: http://www.indobarometer.com/ib/admin/upload_file/155/REFORMASI%20DAN%20KINERJA%20SBY-BOEDIONO-SURNAS%20IB%20%5BMEI%202011%5D.pdf
- Kaufmann, D, Kraay A, and Mastruzzi, M. (2008). *Governance Matters VII: Governance Indicators for 1996-2007*. Washington, D.C. World Bank Policy Research June 2008
- Legawa, T. (2006). *Establishing Good Governance: The Experience of Indonesia*. Paper presented at the Workshop on Governance and Development, organized by Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) in partnership with the World Bank, DFID, the Netherlands Embassy and CIDA, Dhaka 11-12 November 2006

- Macintyre, A. and Ramage D (2008). *Seeing Indonesia as a Normal Country : Implications for Australia*. Barton ACT : Australian Strategic Policy Institute
- MacIntyre, A. and Resosudarmo, B. P. (2003). *Survey of recent development*, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 39(2), pp. 133–156.
- McLeod, R & MacIntyre, A (2007), *Introduction [to Indonesia: Democracy and the Promise of good governance]*, in Ross H McLeod and Andrew MacIntyre (ed.), *Indonesia: Democracy and the Promise of Good Governance*, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore, pp. 1-17
- Morita, S and Zaelke, D. (2007). *Rule of Law, Good Governance and Sustainable Development*. Presented at the Seventh International Conference on Environmental Compliance and Enforcement. Available at: www.inece.org/conference/7/vol1/05_Sachiko_Zaelke.pdf p. 16
- Przeworski, A., Alvarez, M. E, Cheibub, J. A., and Limongi, F. (1996), *What Makes Democracy Endure?*, Journal of Democracy, 7(1), pp.39-55.
- Przeworski, A, and Limongi, F (1997) *Modernization: Theories and Facts*, World Politics, 49 (January, 1997): 155-183
- Rieffel, L. (2007). *Indonesia: Ten Years After the Crisis, The Brookings Institution*. June 28, 2007. Available at: http://www.brookings.edu/opinions/2007/0628globaleconomics_rieffel.aspx
- Schwarz, A. (1994). *A nation in Waiting: Indonesia in the 1990s*, St Leonard, NSW: Allen & Unwin.
- Sukma, R. (2003). *Democratic Governance and Security in Indonesia*, Japanese Journal of Political Science, 4(2), pp. 241–255
- Synnerstrom, S. (2007). *The Civil Service: Towards Efficiency, Effectiveness and Honest'*, in R. H. McLeod and A. MacIntyre (eds), *Indonesia: Democracy and the Promise of Good Governance*, Singapore, ISEAS, pp.160.
- UNESCO (2000). *Indonesia: Learning the ropes of press freedom, February 2000*. Available at http://www.unesco.org/courier/2000_02/uk/connex/intro.htm

USAID (United States Agency for International Development) (2008).
*Indonesia-Democracy and Governance Assessment: Final
Report*, June 2008.

World Bank. (1993). *The East Asian Miracle: Economic Growth and
Public Policy*, Oxford, Oxford University Press